

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi terhadap kedua variabel independen dengan menggunakan model regresi linear berganda dengan metode *Ordinari Least Square* (OLS) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variasi yang terjadi pada jumlah produksi beras dan harga beras dapat menjelaskan variasi penawaran (ketersediaan) beras di Provinsi Sumatera Barat sebesar 88,66 persen dan sisanya sebesar 11,34 persen dipengaruhi oleh variasi variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.
2. Secara parsial jumlah produksi beras menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan beras di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian hipotesis yang menduga kalau produksi beras mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketersediaan beras di Provinsi Sumatera Barat (hipotesis 1) dapat diterima.
3. Dari temuan empiris dalam penelitian ini, terlihat hubungan yang tidak signifikan antara perkembangan harga beras tingkat produsen dengan jumlah ketersediaan beras di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian hipotesis yang menduga kalau harga beras mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketersediaan beras di Provinsi Sumatera Barat (hipotesis 2) tidak dapat diterima (ditolak).
4. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap permintaan beras di Provinsi Sumatera Barat, faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara serempak maupun secara spasial adalah jumlah penduduk dan harga beras tingkat konsumen (harga beras eceran). Dari korelasi yang diperoleh dimana jumlah penduduk berkorelasi positif sedangkan harga

beras eceran berkorelasi negatif terhadap permintaan beras. Hal ini berkaitan dengan fungsi beras yang merupakan komoditas pangan pokok sehingga laju konsumsi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta pola konsumsi masyarakat.

## 6.2. Saran

Jumlah produksi beras masih merupakan faktor yang sangat dominan mempengaruhi jumlah ketersediaan (penawaran) beras di Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu berbagai upaya peningkatan produktivitas tanaman padi yang bermuara kepada tingkat ketersediaan beras atau ketahanan pangan beras di Provinsi Sumatera Barat perlu dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam bentuk program/kegiatan serta didukung dengan alokasi anggaran guna pembiayaannya.

Adapun upaya yang dapat ditempuh antara lain melalui: (i) peningkatan produksi dan produktivitas melalui percepatan diseminasi dan adopsi inovasi teknologi hasil penelitian yang adaptif terhadap perubahan iklim; (ii) penegakan aturan perlindungan lahan pertanian secara konsisten untuk menekan laju konversi lahan; (iii) fasilitasi akses modal dan pembiayaan usaha tani untuk mendorong percepatan peningkatan produksi; (iv) optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan perluasan lahan yang potensial untuk usaha pertanian; dan revitalisasi program keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Dari hasil dianalisis, diketahui bahwa harga beras eceran masih berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya stabilisasi harga harus terus dilakukan untuk memudahkan keterjangkauan terhadap konsumsi pangan. Dengan demikian perlu

dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan produksi disertai dengan ketersediaan pasokan disetiap komoditi seperti peningkatan kesejahteraan petani dan pengendalian harga komoditi.

Salah satu faktor yang dapat menurunkan harga beras di Sumatera Barat adalah penyaluran beras oleh Bulog. Oleh karena itu peningkatan harga beras yang disebabkan oleh kenaikan harga dasar gabah dapat distabilkan dengan penambahan penyaluran beras di Sumatera Barat. Oleh karena itu kebijakan operasi pasar beras yang dulu pernah dijalankan sebaiknya dilaksanakan kembali dan penyaluran program raskin yang ada sekarang tetap perlu dipertahankan.

Diperlukan analisis lebih lanjut dari sisi penawaran dan permintaan beras ini serta membuat angka proyeksi dari sisi penawaran dan permintaan sehingga dapat diketahui berapa selisihnya. Untuk selanjutnya digunakan sebagai masukan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal merumuskan kebijakan ketahanan pangan beras untuk jangka panjang.

